BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan

Pada gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah ini, terlebih dahulu akan menjabarkan sejarah singkat berikut struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi bagian-bagian yang ada didalamnya, sehingga akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kegiatan yang sedang diteliti serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.

4.1.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan surat keputusan Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Bandung nomer : 9922/72 Tanggal 12 Juni 1972, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja, yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Restribusi (BAPAR),
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA),
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEP),
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP),

5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD).

Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD. 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Struktur Organisasi Dipenda mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja diubah menjadi 7 (Tujuh) satuan unit kerja, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Restribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak atau restribusi, dipakai sisitem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah).

Dengan system MAPENDA, petugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak atau restribusi secara langsung kepada wajib pajak atau wajib restribusi *"door to door"*.

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan keputusan mentri dalam negri nomor : 23 tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

dengan dikeluarkannya PERDA NO. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No.23 Tahun 1989, perlu disusun system dan prosedur perpajakan, restribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari system dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 tentang sistem dan prosedur perpajakan, restribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten atau kotamadya daerah tingkat II seluruh wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Dengan diberlakukannya MAPATDA maka system pemungutan pajak atau restribusi daerah yang sebelumnya dilaksanakan secara *"door to door"* menjadi *"selft assessment",* yaitu wajib pajak atau restribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak atau restribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

4.1.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintah terdapat visi dan misi, pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung terdapat visi dan misi sebagai berikut:

A. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah" Profesional dalam pengelolaan pajak daerah dan Retribusi Daerah. Prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan bersahabat)"

B. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah:

1. Mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mewujudkan kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat wajib pajak.
3. Menciptakan aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak.
4. Menciptakan akuntabilitas public.
5. Mewujudkan kinerja ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah.
7. Menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai idealism dan professional
8. Menciptakan administrasi, monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah yang dijadikan tolak ukur kemandirian dalam otonomi daerah.
9. Mewujudkan aparatur Dinas Pendapatan Daerah yang proporsional, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sedangkan MOTTO Dinas Pendapatan Daerah adalah "*Kuingin Engkau Tersenyum Puas"* adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas Dinas Pendapatan Daerah yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada WP sehingga WP merasakan bahwa pajak bukan lagi merupakan suatu beban, tetapi

karena tumbuhnya kesadaran masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mempunyai peranan yang sangat penting demi mewujudkan visi dan misi tersebut dari sektor pendapatan daerah. Untuk itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggali pendapatan dengan tidak memberatkan masyarakat yaitu dengan cara insentifikasi artinya tidak menaikan tarif pajak/retribusi daerah dan tidak menambah jenis pungutan, kecuali ada ketentuan/aturan lain yang lebih tinggi atau disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

4.1.1.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Tujuan dan sasaran perusahaan ataupun lembaga sangat penting karena merupakan landasan untuk pencapaian implementasi suatu misi perusahaan ataupun lembaga berdiri.

A. Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan melancarkan pembangunan di segala bidang yang berhasil guna dan berdaya guna diseluruh pelosok Negara yang serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa dalan ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Berdasakan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan "*Kota Bandung yang maju, berbudaya, mandiri, sejahtera dan agamis*", adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendapatan asli daerah.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan kalancaran pelaksanaan tugas.

B. Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi sumber daya dalam kegiatan Organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai dalam periode satu tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dinas pendapatan daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah 10-15% per tahun dan pendapatan lainnya rata-rata 5% per tahun.
2. Tersedianya sistem dan mekanisme peningkatan pendapatan.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia.

4. Meningktakan disiplin pegawai.
5. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja.

4.1.1.4 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Banjar

Sejarah pemebentukan Kota Banjar tidak terlepas dari sejarah berdirinya Pemerintahan Kabupaten Ciamis di masa lalu. Rangkaian waktu perjalanan berdirinya Pemerintahan Kabupaten Ciamis sampai terbentuknya Pemerintahan Kota Banjar melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

I. Banjar dalam sejarah perkembangannya

Banjar sejak didirikan sampai sekarang mengalami beberapa kali perubahan status, untuik lebih jelas perkembangannya sebagai berikut :

1. Banjar sebagai Ibukota Kecamatan, dari tahun 1937 sampai tahun 1940.
2. Banjar sebagai Ibukota Kawadanaan, dari tahun 1941 sampai dengan 1 Maret 1992.
3. Banjar sebagai Kota Administratif dari tahun 1992 sampai dengan tanggal 20 Februari 2003.
4. Sebagai Kota sejak tanggal 21 Februari 2003.

II. Terbentuknya Banjar Kota administratif

Perkembangan dan kemajuan wilayah Provinsi Jawa Barat umumnya dan Kabupaten Ciamis khususnya wilayah kecamatan Banjar, memerlukan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan

perkembangan dan kemajuan sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Banjar.

Wilayah Kecamatan Banjar menunjukkan perkembangan dan kemajuan dengan cirri dan sifat kehidupan perkotaan, atas hal tersebut wilayah Banjar perlu ditingkatkan menjadi Kota Administratif yang memerlukan pembinaan serta pengaturan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara khusus.

Akhirnya tahun 1992 Pemerintah membentuk Banjar Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991 tentang Pembentukkan Banjar Kota Administratif yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 2 Maret 1992.

III. Terbentuknya Kota Banjar

Semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Banjar Kota Administratif segera ditingkatkan menjadi Pemerintah Kota dimana hal ini pun sejalan dengan tuntutan dan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan di sisi lain Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama-sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Momentum peresmian Kota Banjar yang diikuti pelantikan Pejabat Walikota Banjar dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan Hari jadi Kota Banjar.

4.1.1.5 Sejarah Singkat Pemerintah Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Sumedang, sekitar 45 km Timur Laut Kota Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di Utara, Kabupaten Majalengkadi Timur, Kabupaten Garut di Selatan, Kabupaten Bandung di Barat Daya, serta Kabupaten Subang di Barat.

Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Sumedang, ibukota kabupaten ini, terletak sekitar 45 km dari Kota Bandung. Kota ini meliputi kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Sumedang dilintasi jalur utama Bandung-Cirebon.

Bagian Barat Daya wilayah Kabupaten Sumedang merupakan kawasan perkembangan Kota Bandung. IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), sebelumnya bernama STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri), sertaUniversitas Padjadjaran berlokasi di Kecamatan Jatinangor.

Sebagian besar wilayah Sumedang adalah pegunungan, kecuali di sebagian kecil wilayah Utara berupa dataran rendah.Gunung Tampomas (1.684 m), berada di Utara Sumedang.

4.1.1.6 Sejarah Pemerintah Kabupaten Bogor

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam Pemerintahan,mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampung seperti dikenal dengan nama

Lawanggintung, Lawang Saketeng, Jerokuta, Baranangsiang dan Leuwi Sipatahunan diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibukota Pajajaran terletak di Kota Bogor.

Pakuan sebagai pusat Pemerintahan Pajajaran terkenal pada pemerintahan Prabu Siliwangi (Sri Baginda Maharaja) yang penobatanya tepat pada tanggal 3 Juni 1482, yang selanjutnya hari tersebut dijadikan hari jadi Bogor, karena sejak tahun 1973 telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor sebagai hari jadi Bogor dan selalu diperingati setiap tahunnya sampai sekarang.

Sebagai akibat penyerbuan tentara Banten ke Pakuan Pajajaran catatan mengenai Kota Pakuan tersebut hilang, baru terungkap kembali setelah datangnya rombongan ekspidisi orang-orang Belanda yang dipimpin oleh Scipio dan Riebeck pada tahun 1687, dan mereka meneliti Prasasti Batutulis dan situs-situs lainya yang meyakini bahwa di Bogorlah terletak pusat Pemerintahan Pakuan Pajajaran.

Pada tahun 1745 Gubernur Jendral Hindia Belanda pada waktu itu bernama Baron Van Inhoff membangun Istana Bogor, seiring dengan pembangunan jalan Raya Daenless yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai bekembang.

Pada masa pendudukan Inggris yang menjadi Gubernur Jendralnya adalah Thomas Rafless, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, dimana Istana Bogor direnofasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (Botanikal Garden), beliau juga memperkejakan seorang Planner yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan Buitenzoorg.

Setelah Pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada tahun1903, terbit Undang-undang Desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern sebagai realisasinya dibentuk Staadsgemeente diantaranya adalah:

1. Gemeente Batavia (S. 1903 No. 204)
2. Gemeente Meester (S. 1905 No. 206)
3. Gemeente Buitenzoorg (S. 1905 No. 208)
4. Gemeente Bandoeng (S. 1906 No. 121)
5. Gemeente Cirebon (S. 1905 No. 122)
6. Gemeente Soekabumi (S. 1914 No. 310)

(Regeringsalmanak Voor Nederlandsh Indie 1928 : 746-784)

Pembentukkan Gemeente tersebut bukan untuk kepentingan penduduk Pribumi tetapi untuk kepentingan orang-orang Belanda dan masyarakat Golongan Eropa dan yang dipersamakan (yang menjadi Burgermeester dari Staatsgemeente Buitenzooorg selalu orang-orang Belanda dan baru tahun 1940 diduduki oleh orang Bumiputra yaitu Mr. Soebroto)

Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidak puasan terhadap peran desentralisasi yang ada maka terbentuklah Bestuursher Voorings Ordonantie atau Undang-undang perubahan tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (Staatsblad 1922 No. 216), sehingga pada tahun 1992 terbentuklah Regentschaps Ordonantie

(Ordonantie Kabupaten) yang membuat ketentuan-ketentuan daerah otonomi Kabupaten (Staatsblad 1925 No.79).

Provinsi Jawa Barat dibentuk pada Tahun 1925 (Staatsblad 1924 No. 378 bij Propince West Java) yang terdiri dari 5 keresidenan, 18 Kabupaten (Regentscape) dan Kotapraja (Staads Gemeente), dimana Buitenzoorg (Bogor) salah satu Staand Gemeente di Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan (Staatsblad 1905 No. 208 jo. Staatsblad 1926 No. 368), dengan prinsip Desentralisasi Modern, dimana kedudukan Bugermeester menjadi jelas.

Pada masa pendudukan Jepang kedudukan pemerintahan Kota Bogor menjadi lemah karena pemerintahan dipusatkan pada tingkat keresidenan yang berkedudukan di Kota Bogor, pada masa ini nama-nama lembaga pemerintahan berubah namanya yaitu : Keresidenan menjadi Syoeoe, Kabupaten/regenschaps menjadi ken, Kota/staads Gemeete menjadi Si, Kewedanaan menjadi Gun, Kecamatan/Under District menjadi Soe dan Desa menjadi Koe.

Pada masa setelah kemerdekaan, yaitu setelah pengakuan kedudukan kedaulatan RI pemerintahan Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950. Pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 1965 dan Undang-undang No. 5 tahun 1974 berubah kembali menjadi Kotamdya Daerah

Tingkat II Bogor. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dirubah menjadi Kota Bogor.

4.1.1.7 Sejarah Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Kabupeten Karawang dengan Ibu Kotanya di Purwakarta berjalan sampai dengan tahun 1949. Pada tanggal 29 Januari 1949 dengan Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan Nomor 12, Kabupaten Karawang dipecah dua yakni Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibukota di Subang dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang. Berdasrkan Undang-undang nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diatur penetapan Kabupaten Purwakarta, dengan ibu kota Purwakarta, yang meliputi Kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta.

Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang No.14 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang SK Wali Negeri Pasundan dirubah ditetapkan pembentukan Purwakrta dengan Wilayah Kewedanaan Purwakarta ditanbah dengan masing-masing dua desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur. Sehingga pada tahun 1968 Kabupaten Purwakarta hanya memiliki 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka dengan jumlaj desa sebanyak 70 desa. Untuk selanjtnya dilaksanakan penataan wilayah desa, kelurahan, pembentukan kemantren dan peningkatan status kemantren menjadi

kecamatan yang mandiri. Maka saat itu Kabupaten Purwakrta memiliki wilayah : 183 desa, 9 kelurahan, 8 kemantren dan 11 kecamatan.

Berdasarkan perkembangan Kabupaten Purwakarta, pada tahun 1989 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 821. 26-672 tanggal 29 Agustus 1989 tentang lahirnya lembaga baru yang bernama Wilayah Kerja Pembantu Bupati Purwakarta yang meliputi Wilayah Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Campaka, Perwakilan Kecamatan Cibungur yang pusat kedudukan Bupati Purwakarta berada di Purwakarta. Sedangkan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Wilayah Plered meliputi wilayah Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukatani yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Plered. Wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Wanayasa Kecamatan Kiarapedes, Perwakilan Kecamatan Margasri, dan Kecamatan Bojong, Perwakilan Kecamatan Kiarapedes, Perwakilan Kecamatan Margasri, dan Perwakilan Kecamatan Parakansalam yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Wanayasa berada di Wanayasa yang telah diresmikan pada tanggal 31 Januari 1990 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat.

Setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daera, serta dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001. Serta melalui Peraturan Daerah No. 22 tahun 2001, setelah terjadi restrukturasi organisai pemerintahan di Kabupaten Purwakarta. Jumlah Dinas menjadi 18 Dinas, 3 Badan dan 3 Kantr serta Kecamatan berjumlah 17 buah, kelurahan 9 buah dan desa 183 buah.

4.1.1.8 Sejarah Pemerintah Kabupaten Kuningan

Diperkirakan ± 3.500 tahun sebelum masehi sudah terdapat kehidupan manusia, hal ini didasarkan kepada peninggalan yang ditemukan di Wilayah Kuningan, salah satu bukti peninggalan tersebut terdapat di Kampung Cipari Kelurahan Cigugur yaitu pada tahun 1972 ditemukan peninggalan dengan identifikasi sebuah peti kubur batu, pekakas dari batu dan keramik dan diperkirakan pada masa itu terdapat pemukiman manusia yang telah memiliki kebudayaan tinggi.

Suatu pemukiman masyarakat manusia tersebut baru terwujud dalam bentuk suatu kekuatan politik seperti halnya negara, sebagaimana dituturkan dalam cerita parahyangan dengan nama KUNINGAN.

Negara/Kerajaan Kuningan tersebut berdiri setelah dinobatkan SEUWEUKARMA sebagai Raja/Kepala pemerintahan yang kemudian bergelar RAHIYANG TANGKUKU atau SANG KUKU yang bersemayam di Arile atau Saunggalah.

SEUWEUKARMA menganut ajaran “DANGIANG KUNING’ dan berpegang kepada “SANGHIYANG DHARMA” (Ajaran Kitab Suci). Serta “SANGHIYANG RIKSA (sepuluh pedoman hidup). Ekspansi kekuasaan kuningan pada jaman kekuasaan seuweukarma menyeberang sampai negeri melayu. Pada saat itu masyarakat kuningan merasa hidup aman dan tentram di bawah pimpinan Seuweukarma yang bertahta sampai berusia lama.

Perkembangan kerajaan kuningan selanjutnya seakan akan terputus, dan baru pada 1175 masehi muncul lagi. Kuningan pada waktu itu menganut agama Hindu di

bawah pimpinan RAKEAN DARMARIKSA dan merupakan Daerah otonom yang masuk wilayah kerajaan Sunda yang terkenal dengan nama Pajajaran , dan termasuk cirebon pada tahun 1389 masehi masuk kekuasaan kerajaan pajajaran, namun pada abad ke-15 cirebon sebagai kerajaan islam menyatakan kemerdekaannya dari pakuan pajajaran.

Pada tahun 1470 masehi datang ke Cirebon seorang ulama besar agama Islam yaitu SYEH SYARIF HIDAYATULLAH putra SYARIF ABDULAH dan ibunya RARA SANTANG atau SYARIFAH MO'DAIM putra Prabu SYARIF HIDAYATULLAH adalah murid SAYID RAHMAT yang lebih dikenal dengan nama SUNAN NGAMPEL yang memimpin daerah ampeldenta.

Kemudian SYEH SYARIF HIDAYATULLAH ditugaskan oleh sunan ngampel untuk menyebarkan agama islam di daerah Jawa Barat, dan mula-mula tiba di Cirebon yang pada waktu Kepala Pemerintahan Cirebon dipegang oleh Haji DOEL IMAN.

Pada waktu 1479 masehi Haji Doel Iman berkenan menyerahkan kepada syarif hidayatullah setelah menikah dengan putrinya. Karena terdorong oleh hasrat ingin menyebarkan agama Islam, pada tahun 1481 Masehi Syeh Syarif Hidayatullah berangkat ke daerah Lurangung yang masuk wilayah Cirebon Selatan yang pada waktu itu dipimpin oleh KI GEDENG LURAGUNG yang bersaudara dengan KI GEDENG KASMAYA dari Cirebon, selanjutnya Ki Gedeng Luragung memeluk agama Islam.

Pada waktu Syeh Syarif Hidayatullah di Luragung, datanglah Ratu Ontin Nio istrinya dalam keadaan hamil dari negeri Cina (bergelar: Ratu Rara Sumanding) ke Luragung, dari Ratu Ontin Nio alias Ratu Lara Sumanding lahir seorang putra yang tampan dan gagah yang diberi nama Pangeran Kuningan. setelah dari Luragung, Syeh Syarif Hidayatullah dengan rombongan menuju tempat tinggal Ki Gendeng Kuningan di Windu Herang, dan menitipkan Pangeran Kuningan yang masih kecil kepada Ki Gendeng Kuningan agar disusui oleh istri Ki Gendeng Kuningan, karena waktu itu Ki Gendeng Kuningan mempunyai putera yang sebaya dengan Pangeran Kuningan nemanya Amung Gegetuning Ati yang oleh Syeh Syarif Hidayatullah diganti namanya menjadi Pangeran Arya Kamuning serta beliau memberikan amanat bahwa kelak dimana Pangeran Kuningan sudah dewasa akan dinobatkan menjadi Adipati Kuningan.

Setelah Pangeran Kuningan dan Pangeran Arya Kamuning tumbuh dewasa, diperkirakan tepatnya pada bulan Muharam tanggal 1 September 1498 Masehi, Pangeran Kuningan dilantik menjadi kepala pemerintahan dengan gelar Pangeran Arya Adipati Kuningan dan dibantu oleh Arya Kamuning. Maka sejak itulah dinyatakan sebagai titik tolak terbentuknya pemerintahan Kuningan yang selanjutnya ditetapkan menjadi tanggal hari jadi Kuningan

4.1.1.9 Sejarah Pemerintah Kabupaten Indramayu

Sejarah putra Tumenggung Gagak Singalodra dari Bengelen Jawa Tengah bernama Raden Wiralodra yang mempunyai garis keturunan Majapahit dan Pajajaran,

dalam tapa baratanya di kaki Gunung Sumbing mendapat wangsit "Hai Wiralodra apabila engkau ingin berbahagia berketurunan di kemudian hari, pergilah kearah matahari terbenam dan carilah lembah Sungai Cimanuk. Manakala telah disana, berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pedukuhan dan menetaplah disana. Kelak tempat itu akan menjadi subur dan makmur serta tujuh turunanmu akan memerintah disana.

R. Wiralodra ditemani Ki Tinggil dan berbekal senjata Cakra Undaksana. Tokoh-tokoh lain dengan pendiri pedukuhan dimaksud adalah Nyi Endang Darma yang cantik dan sakti, Aria Kemuning putra Ki Gede Lurah Agung yang diangkat putra oleh Putri Ong Tien istri Sunan Gunung Jati. Ki Buyut Sidum / Kidang Pananjung seorang pahlawan Panakawan Sri Baduga dari Pajajaran, Pangeran Guru, seorang pangeran dari Palembang yang mengajarkan Kanuragan dengan 24 muridnya. Pedukuhan tersebut berkembang dan diberi nama "Darma Ayu" oleh R. Wiralodra yang diambil dari nama seorang wanita yang dikagumi karena kecantikan dan tkesaktiannya "Nyi Endang Darma", serta dapat diartikan "Kewajiaban Yang Utama" atau "Tugas Suci". Pedukuhan Cimanuk yang diberi nama "Darma Ayu" yang kemudian berubah menjadi "Indramayu", setelah terbebas dari kekuasaan Pajajaran pada tahun 1527, diproklamirkan berdirinya oleh R. Wiralodra pada hari Jumat Kliwon tanggal 1 Muharram 934H atau 1 Sura 1449 dan jatuh pada tanggal 7 Oktober 1527. Titimangsa tersebut resmi sebagai Hari Jadi Indramayu.

Setelah 1527, Daerah Indramayu terbagi dalam tiga propinsi meliputi :

1. Propinsi Singapura, meliputi sebelah timur sampai Sungai Kamal.
2. Propinsi Rajagaluh, meliputi daerah tengah sampai Jati tujuh.
3. Propinsi Sumedang, meliputi bagian barat sampai Kandanghaur.

Tahun 1681, mulai dikuasai kompeni. Zaman pemerintahan Daenles (1806 - 1811) daerah sebelah barat sungai Cimanuk dimasukan dalam prefektur Cirebon Utara. Pada masa ini berada dalam kekuasaan kerajaan Demak. Tahun 1546 menjadi bagian kesultanan Cirebon.

Tahun 1615 sebelah timur Sungai Cimanuk menjadi bagian keultanan Cirebon dan bagian baratnya termasuk dalam wilayah kerajaan Mataram.

Tahun 1681, mulai dikuasai kompeni. Zaman pemerintahan Daenles (1806 - 1811) daerah sebelah barat sungai Cimanuk dimasukan dalam prefektur Cirebon Utara. Pada zaman kompeni menjadi ajang masuk pertempuran segitiga antara kompeni, Mataran dan Banten. Tahun 1706, Indramayu jatuh kedalam kekuasaan kompeni Belanda seluruhnya seperti halnya dengan daerah-daerah lain, Indramayu mempunyai perjalanan yang sama berada dalam kekuasaan penjajahan.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah berbentuk *line* staf, karena terlihat adanya kewenangan dan tanggung jawab yang berjalan dari kepala dinas sampai kebawah menurut suatu garis vertical (komando).

Susunan organisasi sangat diperlukan untuk pengelolaan suatu perusahaan dan lembaga agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Di bawah ini merupakan struktur organisasi Dinas Pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

II. Bagian Tata Usaha, membawahi:
   1. Sub Bagian Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
   3. Sub Bagian Keuangan.

III. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
   1. Seksi Perencanaan;
   2. Seksi Pengendalian;
   3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

IV. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahi:
   1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah;
   2. Seksi Penagihan Pendapatan Asli Daerah;
   3. Seksi Pembukuan Pendapatan Asli Daerah.

V. Bidang Pendapatan Lain-lain, membawahi:
   1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain;
   2. Seksi Penagihan Pendapatan Lain-lain;
   3. Seksi Pembukuan Pendapatan Lain-lain.

4.1.3 Deskripsi Tugas

Untuk menunjang program kegiatan maka Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan kegiatannya dimana akan diuraikan tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala Dinas memiliki fungsi:

1. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasional.
2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas.
3. Menyusun rencana strategis Dinas yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan.
4. Memberikan informasi mengenai pendapatan daerah, saran dan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan penentuan kebijakan atau pengambilan keputusan.
5. Mempertanggungjawabkan Dinas secara teknis operasional dan teknis administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi Pemerintahan maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
7. Mempersiapkan bahan untuk penetapan kebijaksanaan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Mengandalkan pembinaan dan motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi para pegawai dilingkungan Dinas.
9. Membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

II. Bagian Tata Usaha

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum di lingkungan Dinas.
2. Menyusun rencana anggaran rutin.
3. Menyusun pedoman tata laksana administrasi umum.
4. Melaksanakan pengolahan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
5. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya.
6. Menyelenggarakan kegiatan rumah tangga Dinas.
7. Menyiapkan rancangan peraturan atau keputusan serta melaksanakan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan atau keputusan yang berhubungan dengan tugasnya.
8. Memberikan telaahan staf kepada Kepala Dinas sebagai bahan penetapan kebijakan.
9. Menciptakan tertib administrasi dan tertib tata kerja organisaasi.

10. Mengumpulkan, pengolahan, pemeliharaan dan penyajian data serta pengurusan perpustakaan sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas.
11. Menyusun laporan ketatausahaan dinas secara periodik.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

1. Sub Bagian Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
3. Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mengumpulkan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Dinas.
c. Menyususn Daftar Urut Kepegawaian (DUK) dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan Dinas.
d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana formasi usulan pengangkatan mutasi pegawai di lingkungan Dinas.
e. Menyusun rencana pengembangan pegawai di lingkungan Dinas.

f. Menyiapkan pengajuan/usulan dan pengiriman pegawai di lingkungan Dinas yang akan diikut sertakan dalam pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.
g. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas.
h. Menyiapkan bahan untuk pengajuan/usulan pegawai yang akan diberi tanda penghargaan di lingkungan Dinas.
i. Menyiapkan bahan-bahan pertimbangan pimpinan untuk perkawinan dan perceraian pegawai di lingkungan Dinas.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas.
b. Menerima, pendistribusian dan mengirim surat-surat/naskah-naskah Dinas.
c. Menyelenggarakan, mengerjakan pengetikan dan pengadaan surat-surat/naskah-naskah Dinas.
d. Menyimpan, mengatur dan memelihara arsip Dinas.
e. Melaksanakan urusan rumah tangga, perjalanan tugas dan keprotokolan.

f. Menginventarisasi dan pemeliharaan kendaraan Dinas.
g. Menyelenggarakan adanya tertib administrasi, tertib administrasi ketatalaksanaan dan tertib hukum bagi satuan organisasi Dinas.
h. Menyiapkan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat Dinas.
i. Merencanakan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk penggunaan/peruntukannya.
j. Memelihara ruangan dan pekarangan kantor.
k. Merencanakan dan melakukan analisa kebutuhan pelengkapan dan pembekalan untuk keperluan Dinas.
l. Melakukan langkah-langkah dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan perlengkapan dan perbekalan untuk keperluan Dinas.
m. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan dan perbekalan serta benda berharga.
n. Menginventarisasi dan memelihara semua perlengkapan Dinas termasuk gedung-gedung.
o. Menyediakan dan merencanakan semua kebutuhan-kebutuhan kendaraan Dinas.
p. Mengurus administrasi perlengkapan.
q. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang-barang inventaris.
r. Mengendalikan barang-barang inventaris.
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugasnya.

3) Sub bagian Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tertera pada ayat (1) di atas, maka Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK).
c. Menyiapakan dan mengurus Surat Perintah Pembayaran (SPP).
d. Melaksanakan pembukuan keuangan belanja rutin secara sistematis sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku.
e. Menyusun daftar gaji dan tunjangan daerah serta pelaksanaan pembayaran.
f. Menerima, menyimpan dan membayar uang untuk keperluan Dinas.
g. Menyimpan dan mengurus bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya.
h. Menyusun posisi dan komposisi kas secara berkala.
i. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam hal administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bagian Perencanaan dan Pengendalian Oerasional memiliki fungsi:

1. Merencanakan dan menghitung target pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pendapatan daerah lain-lain.
2. Membina teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lain-lain serta pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).
3. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pendapatan daerah yang meliputi pemantaun dan penendalian.
4. Melaksanakan analisa dan evaluasi pendapatan daerah serta membuat laporan pendapatan daerah.
5. Melakuakan kerja sma dengan instansi dan Dinas lainnya.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh:

1. Seksi Perencanaan

   Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Perencanaan

   Mempunyai fungsi:

a. Menyusun target atau rencana pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pendapatan dan pendapatan lain-lain.
b. Menyusun program kerja Dinas Pendapatan Daerah.
c. Menyusun rancangan Peraturan Daerah dan keputusan Walikota tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
d. Menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan Dinas dan bahan rancangan peraturan perundang-undangan.
e. Melaksanakan pembinaan tata kerja dan tata hubungan kerja.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengendalian

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pengendalian mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan pemeriksaaan lapangan mengenai pendapatan daerah.
b. Menyusun rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
c. Menyusun rancangan Peraturan Daerah dan keputusan Walikota tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
d. Membuat surat teguran dan surat-surat yang berhubungan dengan penegakan hukum atau pelaksanaan sanksi.
e. Menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi pendapatan pajak daerah dan retribusi daaerah.

f. Merumuskan penyelesaian permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan data dan pengolahan data sumber pendapatan daerah.

b. Pengkajian realisasi pendapatan daerah.

c. Pelaksanaan evaluasi pendapatan daerah secara berkala bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

d. Penyususnan laporan pendapatan daerah secara periodik mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Bidang Pendapatan Asli Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pendapatan Asli Daerah

Mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pendaftaran dan penadataan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya yang sah.
2. Menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah serta PAD lainnya yang sah.
3. Menyusun daftar induk WP dan retribusi darah serta PAD lainnya yang sah.
4. Malaksanakan pemeriksaan atas objek pajak dan retribusi daerah.
5. Membuat surat teguran untuk menyampaikan kembali STPPD.
6. Menghitung pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Menertibkan dan menyimpan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah.
8. Melakukan kerja sama dengan instansi vertical dan Dinas lainnya.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal 11, Bidang Pendapatan Asli Daerah dibantu oleh:

1. Seksi Pendataan dan Penetapan PAD

   Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pendataan dan Penetapan PAD memiliki fungsi:

   a. Mendaftar dan mendata wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
   b. Melaksanakan pendistribusian SPTPD dan SPTRD.

c. Menghimpun dan mengolah ata objek dan subjek wajib pajak/retribusi melalui formulir SPTPD dan SPTRD.
d. Melaksanakan pemerikasaan lokasi atau lapangan wajib pajak dan retribusi daerah.
e. Membuat surat teguran untuk menyampaikan kembali SPTPD dan SPTRD.
f. Menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah.
g. Menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran.
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
i. Menghitung jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui.
j. Menertibkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
k. Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi darah yang berkaitan dengan penetapan.
l. Melayanai keberatan dan permohonan banding yang sesuai dengan batas kebenarannya.
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penagihan PAD

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Penagihan PAD memiliki fungsi:

a. Menginventarisasi tunggakan-tunggakan dari semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal ini tunggakan atas wajib pajak/retribusi yang terhutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam SKP/SKR.
b. Membuat peringatan/teguran/surat paksa/surat cari yang sejenis terhadap para wajib pajak daerah/retribusi yang terutang.
c. Memantau terhadap para wajib pajak/retribusi yang telah menerima surat teguran, surat paksa dan surat lainnya.
d. Memberikan surat paksa terhadap para wajib pajak/retribusi yang tidak mengindahkan.
e. Memberikan surat perintah pelksanaan penyitaan bagi para wajib pajak/retribusi yang tidak mengindahkan terhadap surat sebelumnya.
f. Mengajukan penetapan tanggal permintaan pelelangan kepada kantor lelang Negara jika wajib pajak/retribusi masih belum melunasinya.

3. Seksi Pembukuan PAD

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pembukuan PAD memiliki fungsi:

a. Mencatat penerimaan dan pemungutan/penyetoran pajak daerah/retribusi darerah.

b. Membukukan terhadap SKPD/SKRD dan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi daerah alinnya.
c. Mencatat mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga.
d. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, menghitung realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan, dan tahunan.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Bidang Pendapatan Lain-lain

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:

1. Menyusun dan mengumpulkan data potensi dan melaksanakan penagihan bagi hasil pendapatan yang brasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Sumber Daya Alam, Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21, serta bagi hasil lainnya termasuk bagian Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum.

2. Mengumpulkan data potensi dan melaksanakan penagihan pendapatan alin-lain.
3. Menghitung besarnya bagian yang akan diperoleh dari bagi hasil pendapatan.
4. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pendapatan lain-lain.
5. Mencatat hasil pemantauan penyetoran ke Bank persepsi jenis penerimaan pajak dan bukan pajak yang menjadi bagian hak Pemerintah Daerah.
6. Membuat daftar realisasi pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak pendapatan lain-lain.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendapatan Lain-lain di bantu oleh:

1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain;

   Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:

   a. Mengumpulkan dan menyusun data potensial bagi hasil yang beasal dari PBB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21, serta bagi hasil pajak lainnya dan pendapatan lain-lain.
   b. Menyusun data potensi bagi hasil pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak, Sumber Daya Alam dan bagi hasil lainnya termasuk DAU dan DAK dan potensi BUMD.

c. Membuat surat permintaan transfer yang berisi permintaan mentransfer bagian yang menjadi hak Pemerintah Daerah.
d. Mencatat dan mendata sumbangan pihak ke tiga.
e. Mencatat hasil pemantauan penyetoran bagi hasil pajak ke Bank pesepsi yang menjadi bagian hak Pemerintah Daerah.
f. Menghitung besarnya bagian yang akan diperoleh bagi hasil pajak dan bukan pajak.
g. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penagihan Pendapatan Lain-lain

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Penagihan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:

a. Menginventarisir tunggakan-tunggakan objek pajak PBB maupun pajak-pajak lainnya seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, BPHTB, PPh OP Dalam Negeri, PPh pasal 21 da BUMD, setelah data-data tunggakan tersebut diterima dari instansi terkait.
b. Membuat surat peringatan/teguran/surat paksa/surat lainnya yang sejenis terhadap objek pajak PBB, pajak-pajak lainnya yang terhitung dan bagi BUMD-BUMD yang belum menyetor kewajibannya yang telah menentukan.

c. Memantau terhadap objek pajak PBB, pajak-pajak lainnya serta BUMD-BUMD yang telah menerima Surat Peringatan, Surat Teguran, Surat Paksa, dan surat-surat lainnya.
d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan aktif (proses surat paksa, penyitaan sampai dengan lelang).
e. Memberikan surat perintah melaksanakan penyitaan bersama instansi terkait bagi objek pajak PBB/Pajak-pajak lainnya, yang tidak menginahkan terhadap surat sebelumnya.
f. Mengajukan penetapan tanggal penerimaan pelelangan kepada kantor lelang Negara jika objek pajak PBB atau pajak lainnya masih belum melunasinya.
g. Membuat surat permintaan transfer yang berisi permintaan mentransfer bagian yang menjadi bagian hak Pemerintah Daerah.
h. Mencatat hasil pemantauan penyetoran pajak lain-lain ke Bank Persepsi yang menjadi bagian hak Pemerintah Daerah.
i. Menghitung besarnya bagian yang akan diperoleh dari bagi hasil pajak dan pajak lain-lain.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pembukuan Pendapatan Lain-lain.

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi PembukuanPendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:

a. Mencatat mengenai penerimaan bagi hasil pendapatan yang terdiri dari PBB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, PPh OP Dalam Negeri dan PPH pasal 21, Bea DAU dan bagi hasil pendapatan lain-lain.
b. Melaporkan realisasi penerimaan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak, penerimaan BUMD dan penerimaan lain-lain secar bulana, triwulan dan tahunan.
c. Mencatat mengenai penetapan dan penerimaan pendapatan lain-lain.
d. Mencatat mengenai penerimaan pendapatan lain-lain.
e. Menghitung besarnya bagian yang akan diperoleh dari bagi hasil pajak dan Pendapatan Daerah.
f. Mencatat penerimaan lain-lain ke dalam kartu kendali berdasarkan buku pembantu penerimaan sejenis dari BKP DIPENDA.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 30 responden dari 7 kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian di provinsi Jawa Barat. Data mengenai karakteristik responden yang mengisi kueisoner faktor-faktor manajerial adalah sebagai berikut :

a. Profil Responden Berdsarkan Usia

Profil Responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
21-30 Tahun	9	30
31-40 Tahun	18	60
41-50 Tahun	3	10
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui profil pegawai Dinas Pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan usia. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden yang berusia 21-30 tahun berjumlah 9 orang atau sebesar 30%, yang berusia 31-40 tahun berjumlah 18 orang atau sebesar 60%, yang berusia 41-50 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 10%. Jadi responden paling banyak berdasarkan usia adalah responden yang berusia antara 31-40 tahun.

Hal ini dikarenakan oleh pada tingkat usia 31-40 adalah merupakan masa yang matang dan produktif untuk bergabung dan menjalankan sebuah penugasan kantor. Dinas Pendapatan pun mengharapkan para karyawannya dapat bekerja dengan baik guna meningkatkan mutu kantornya.

b. Profil Responden Berdasrkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Pria	21	70
Wanita	9	30
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui profil Pegawai Dinas Pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 21 orang atau sebesar 70%, dan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 9 orang atau sebesar 30%, jadi responden paling banyak berdasarkan jenis kelamin adalah pria. Jumlah responden lebih banyak pria karena untuk menjalankan pengawasan dan duduk dalam pengawasan diharapkan adalah pria karena pria dianggap mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih baik dibandingkan pengawasan yang dijalankan oleh wanita.

c. Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Profil responden berdasarkan lamanya bekerja dapat dilihat pada Tabel 4.3 seperti di bawah ini :

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Lamanya Bekerja

Lamanya Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
1-10 Tahun	24	80
11-20 Tahun	5	17
21-30 Tahun	1	3
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui profil pegawai Dinas Pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan lamanya bekerja. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden yang lama bekerjanya berkisar antara 1-10 tahun berjumlah 24 orang atau sebesar 80%, untuk responden yang lama bekerjanya antara 11-20 tahun berjumlah 5 orang atau sebesar 17%, sedangkan responden yang lama bekerjanya antara 21-30 tahun berjumlah 1 orang atau sebesar 3%. Jadi responden yang paling banyak adalah yang lama bekerjanya antara 1-10 tahun. Jumlah responden yang lama bekerjanya berkisar antara 1-10 tahun berjumlah 24 orang lebih banyak dibandingkan dengan lamanya bekerja antara 11-20 tahun yang berjumlah 5 orang dan lamanya bekerja antara 21-30 tahun yang berjumlah 1 orang lebih sedikit karena yang lamanya bekerja antara 1-10 tahun mampu menjalankan pekerjaan dengan baik.

d. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Profil responden pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
S2	3	10
S1	14	47
Diploma	13	43
Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui profil pegawai Dinas Pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan pendidikan terakhir. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang berpendidikan S2 berjumlah 3 orang atau 10%, responden yang berpendidikan S1 berjumlah 14 orang atau 47%, responden yang berpendidikan Diploma berjumlah 13 orang atau 43% . Jadi responden paling banyak berdasarkan pendidikan terakhir adalah S1.

Responden dengan tingkat pendidikan S1 adalah yang paling banyak, hal ini dikarenakan karena kebanyakan karyawan menuntut tingkat pendidikan yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan responden dengan tingkat pendidikan S1 lebih banyak bila dibandingkan dengan responden dengan tingkat pendidikan yang lain.

4.2.1 Analisis Deskriptif Data Penelitian

4.2.1.1 Faktor Manajerial (X_1)

Faktor manajerial pada Dinas Pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 indikator yang dioperasionalisasikan menjadi 30 butir pernyataan. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan hasil tanggapan responden, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi jumlah skor tanggapan responden di adopsi dari buku Metode Penelitian Bisnis karangan Sugiyono (2007;135) yaitu berdasarkan persentase skor jawaban responden dengan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ Skor } = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}}$$

Keterangan:

Skor ideal = jumlah skor jawaban responden

Skor ideal = jumlah skor maksimum (jumlah responden × jumlah pernyataan × 5)

Selanjutnya persentase skor jawaban responden yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rentang persentase skor maksimum (5/5 =100%) dan skor minimum (1/5 = 20%). Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada setiap variabel yang diteliti dengan berpedoman pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Kriteria Pengklasifikasian Presentase Skor Tanggapan Responden

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1	20.00% – 36.00%	Tidak Baik/Sangat Rendah
2	36.01% – 52.00%	Kurang Baik/Rendah
3	52.01% – 68.00%	Cukup Baik/Cukup Tinggi
4	68.01% – 84.00%	Baik/Tinggi
5	84.01% – 100%	Sangat Baik/Sangat Tinggi

Sumber: Sugiyono (2007:135)

Berikut hasil kategorisasi terhadap skor tanggapan responden mengenai faktor manajerial pada Dinas Pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

a) Intervensi Birokrasi dan Politis

Intervensi birokrasi dan politis diukur menggunakan 2 butir pernyataan menyangkut intervensi birokrasi atau campur tangan pemerintah.

Tabel 4.6
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Intervensi Birokrasi dan Politis

Tanggapan responden	**Item 1**		**Item 2**	
	F	**%**	**f**	**%**
Sangat setuju	6	20,00%	0	0,00%
Setuju	11	36,67%	24	80,00%
Ragu-ragu	11	36,67%	4	13,33%
Tidak setuju	2	6,67%	2	6,67%
Sangat tidak setuju	0	0,00%	0	0,00%
Total	**30**	**100%**	**30**	**100%**
% skor	**74,00%**		**74,67%**	

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.6 dapat dilihat paling banyak responden sependapat dengan pernyataan item 1, artinya paling banyak responden sependapat bahwa adanya intervensi birokrasi atau campur tangan pemerintah menyebabkan daerah otonom tidak seluas dalam mengembangkan potensi daerah. Demikian juga dengan

pernyataan item 2, mayoritas responden sependapat bahwa dalam pelaksanaannya pada tahap pemeliharaannya badan pengawas dan dewan direksi, campur tangan pemerintah akan dilakukan secara langsung.

Selanjutnya akan dilakukan kategorisasi skor tanggapan responden tentang intervensi birokrasi dan politis pada masing-masing Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 4.7
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Intervensi Birokrasi Pada Masing-Masing Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	**Skor**	**Nomor Item Pernyataan**		**Total**
		1	**2**	
Kota Bandung	Aktual	20	20	**40**
	Ideal	25	25	**50**
	%	80,0%	80,0%	**80,0%**
Kab. Kuningan	Aktual	14	14	**28**
	Ideal	20	20	**40**
	%	70,0%	70,0%	**70,0%**
Kota Banjar	Aktual	17	17	**34**
	Ideal	25	25	**50**
	%	68,0%	68,0%	**68,0%**
Kab. Sumedang	Aktual	15	16	**31**
	Ideal	20	20	**40**
	%	75,0%	80,0%	**77,5%**
Kab. Bogor	Aktual	14	14	**28**
	Ideal	20	20	**40**
	%	70,0%	70,0%	**70,0%**
Kab. Purwakarta	Aktual	17	16	**33**
	Ideal	20	20	**40**
	%	85,0%	80,0%	**82,5%**
Kab. Indramayu	Aktual	14	15	**29**
	Ideal	20	20	**40**
	%	70,0%	75,0%	**72,5%**
Akumulasi	**Aktual**	**111**	**112**	**223**
	Ideal	**150**	**150**	**300**
	%	**74,0%**	**74,7%**	**74,3%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Bila dilihat berdasarkan kabupaten kota, intervensi birokrasi dan politis pada Dinas Pendapatan kabupaten Purwakarta merupakan yang paling baik, yaitu masuk kategori tinggi, sebaliknya intervensi birokrasi dan politis pada Dinas Pendapatan kota Banjar merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori cukup tinggi. Secara keseluruhan intervensi birokrasi dan politis pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat termasuk tinggi, hal ini tercermin dari persentase akumulasi total skor tanggapan responden sebesar 74,3% yang termasuk dalam kategori tinggi.

b) Otonomi Manajemen

Otonomi manajemen diukur menggunakan 2 butir pernyataan menyangkut kemandirian pihak manajemen dalam melaksanakan peraturan daerah.

Tabel 4.8
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Otonomi Manajemen

Tanggapan responden	**Item 3**		**Item 4**	
	F	**%**	**f**	**%**
Sangat setuju	8	26,67%	1	3,33%
Setuju	10	33,33%	22	73,33%
Ragu-ragu	12	40,00%	5	16,67%
Tidak setuju	0	0,00%	2	6,67%
Sangat tidak setuju	0	0,00%	0	0,00%
Total	**30**	**100%**	**30**	**100%**
% skor	**77,33%**		**74,67%**	

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.8 dapat dilihat paling banyak responden sependapat dengan pernyataan item 3, artinya paling banyak responden sependapat bahwa kemandirian pihak manajemen dalam melaksanakan peraturan daerah dapat dilihat dari tingkat kemandirian dalam pengambilan keputusan. Demikian juga dengan pernyataan item 4, mayoritas responden sependapat bahwa keputusan kepala daerah harus mendapat kemandirian dalam mendapatkan keputusan oleh pihak direksi.

Selanjutnya akan dilakukan kategorisasi skor tanggapan responden tentang otonomi manajemen pada masing-masing Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Otonomi Manajemen Pada Masing-Masing Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	**Skor**	**Nomor Item Pernyataan**		**Total**
		3	**4**	
Kota Bandung	Aktual	19	19	**38**
	Ideal	25	25	**50**
	%	76,0%	76,0%	**76,0%**
Kab. Kuningan	Aktual	15	16	**31**
	Ideal	20	20	**40**
	%	75,0%	80,0%	**77,5%**
Kota Banjar	Aktual	17	15	**32**
	Ideal	25	25	**50**
	%	68,0%	60,0%	**64,0%**
Kab. Sumedang	Aktual	15	16	**31**
	Ideal	20	20	**40**
	%	75,0%	80,0%	**77,5%**
Kab. Bogor	Aktual	17	17	**34**
	Ideal	20	20	**40**
	%	85,0%	85,0%	**85,0%**
Kab. Purwakarta	Aktual	19	16	**35**
	Ideal	20	20	**40**
	%	95,0%	80,0%	**87,5%**
Kab. Indramayu	Aktual	14	13	**27**

Kabupaten/Kota	Skor	Nomor Item Pernyataan		Total
		3	4	
	Ideal	20	20	**40**
	%	70,0%	65,0%	**67,5%**
Akumulasi	**Aktual** **Ideal**	**116** **150**	**112** **150**	**228** **300**
	%	**77,3%**	**74,7%**	**76,0%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Bila dilihat berdasarkan kabupaten kota dapat dilihat, otonomi manajemen pada Dinas Pendapatan kabupaten Purwakarta merupakan yang paling baik, yaitu masuk kategori sangat baik, sebaliknya otonomi manajemen pada Dinas Pendapatan kota Banjar merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori cukup baik. Secara keseluruhan otonomi manajemen pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat termasuk baik, hal ini tercermin dari persentase akumulasi total skor tanggapan responden sebesar 76,0% yang termasuk dalam kategori baik.

c) Profesionalisme Manajemen

Profesionalisme manajemen diukur menggunakan 2 butir pernyataan menyangkut latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman dan reputasi.

Tabel 4.10
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Profesionalisme Manajemen

Tanggapan responden	Item 5		Item 6	
	F	%	f	%
Sangat setuju	5	16,67%	3	10,00%
Setuju	14	46,67%	18	60,00%
Ragu-ragu	9	30,00%	9	30,00%
Tidak setuju	2	6,67%	0	0,00%
Sangat tidak setuju	0	0,00%	0	0,00%
Total	**30**	**100%**	**30**	**100%**

Tanggapan responden	Item 5		Item 6	
	F	%	f	%
% skor	74,67%		76,00%	

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.12 dapat dilihat paling banyak responden sependapat dengan pernyataan item 5, artinya paling banyak responden sependapat bahwa latar belakang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sudah sesuai dengan organisasi perusahaan. Demikian juga dengan pernyataan item 6, mayoritas responden sependapat bahwa kompetensi dewan direksi dalam dunia bisnis merupakan indikator profesionalisme.

Selanjutnya akan dilakukan kategorisasi skor tanggapan responden tentang profesionalisme manajemen pada masing-masing Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Profesionalisme Manajemen Pada Masing-Masing Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Skor	Nomor Item Pernyataan		Total
		5	6	
Kota Bandung	Aktual	18	20	**38**
	Ideal	25	25	**50**
	%	72,0%	80,0%	**76,0%**
Kab. Kuningan	Aktual	15	16	**31**
	Ideal	20	20	**40**
	%	75,0%	80,0%	**77,5%**
Kota Banjar	Aktual	17	17	**34**
	Ideal	25	25	**50**
	%	68,0%	68,0%	**68,0%**
Kab. Sumedang	Aktual	13	14	**27**
	Ideal	20	20	**40**
	%	65,0%	70,0%	**67,5%**
Kab. Bogor	Aktual	17	16	**33**
	Ideal	20	20	**40**
	%	85,0%	80,0%	**82,5%**

Kabupaten/Kota	Skor	Nomor Item Pernyataan		Total
		5	6	
Kab. Purwakarta	Aktual	18	17	**35**
	Ideal	20	20	**40**
	%	90,0%	85,0%	**87,5%**
Kab. Indramayu	Aktual	14	14	**28**
	Ideal	20	20	**40**
	%	70,0%	70,0%	**70,0%**
Akumulasi	**Aktual**	**112**	**114**	**226**
	Ideal	**150**	**150**	**300**
	%	**74,7%**	**76,0%**	**75,3%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Bila dilihat berdasarkan kabupaten kota, profesionalisme manajemen pada Dinas Pendapatan kabupaten Purwakarta merupakan yang paling baik, yaitu masuk kategori sangat tinggi, sebaliknya profesionalisme manajemen pada Dinas Pendapatan kabupaten Sumedang merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori cukup baik. Secara keseluruhan otonomi manajemen pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat termasuk baik, hal ini tercermin dari persentase akumulasi total skor tanggapan responden sebesar 75,3% yang termasuk dalam kategori baik.

d) Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan diukur menggunakan 2 butir pernyataan menyangkut besar dan kecilnya serta luas dan sempitnya kewenangan yang telah diberikan.

Tabel 4.12
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Mekanisme Pengambilan keputusan

Tanggapan responden	**Item 7**		**Item 8**	
	F	**%**	**f**	**%**
Sangat setuju	4	13,33%	3	10,00%
Setuju	13	43,33%	17	56,67%
Ragu-ragu	11	36,67%	10	33,33%
Tidak setuju	2	6,67%	0	0,00%
Sangat tidak setuju	0	0,00%	0	0,00%
Total	**30**	**100%**	**30**	**100%**
% skor	**72,67%**		**75,33%**	

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.12 dapat dilihat paling banyak responden sependapat dengan pernyataan item 7, artinya paling banyak responden sependapat bahwa mekanisme pengambilan keputusan dapat dilihat dari besar dan kecilnya serta luas dan sempitnya kewenangan yang telah diberikan perusahaan. Demikian juga dengan pernyataan item 8, mayoritas responden sependapat bahwa mekanisme pengambilan keputusan perusahaan daerah bisa tergambarkan pada besar dan kecilnya kewenangan yang di berikan.

Selanjutnya akan dilakukan kategorisasi skor tanggapan responden tentang mekanisme pengambilan keputusan pada masing-masing Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 4.13
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Mekanisme Pengambilan Keputusan Pada Masing-Masing Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	**Skor**	**Nomor Item Pernyataan**		**Total**
		7	**8**	
Kota Bandung	Aktual	19	19	**38**
	Ideal	25	25	**50**
	%	76,0%	76,0%	**76,0%**

Kabupaten/Kota	Skor	Nomor Item Pernyataan		Total
		7	8	
Kab. Kuningan	Aktual	13	13	**26**
	Ideal	20	20	**40**
	%	65,0%	65,0%	**65,0%**
Kota Banjar	Aktual	16	20	**36**
	Ideal	25	25	**50**
	%	64,0%	80,0%	**72,0%**
Kab. Sumedang	Aktual	15	14	**29**
	Ideal	20	20	**40**
	%	75,0%	70,0%	**72,5%**
Kab. Bogor	Aktual	15	15	**30**
	Ideal	20	20	**40**
	%	75,0%	75,0%	**75,0%**
Kab. Purwakarta	Aktual	18	17	**35**
	Ideal	20	20	**40**
	%	90,0%	85,0%	**87,5%**
Kab. Indramayu	Aktual	13	15	**28**
	Ideal	20	20	**40**
	%	65,0%	75,0%	**70,0%**
Akumulasi	**Aktual**	**109**	**113**	**222**
	Ideal	**150**	**150**	**300**
	%	**72,7%**	**75,3%**	**74,0%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Bila dilihat berdasarkan kabupaten kota, mekanisme pengambilan keputusan pada Dinas Pendapatan kabupaten Purwakarta merupakan yang paling baik, yaitu masuk kategori sangat baik, sebaliknya mekanisme pengambilan keputusan pada Dinas Pendapatan kabupaten Kuningan merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori cukup baik. Secara keseluruhan mekanisme pengambilan keputusan pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat termasuk baik, hal ini tercermin dari persentase akumulasi total skor tanggapan responden sebesar 74,0% yang termasuk dalam kategori baik.

e) Pemnafaatan Aset

Pemanfaatan aset diukur menggunakan 2 butir pernyataan menyangkut pemanfaatan asset secara optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tabel 4.14
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Pemanfaatan Aset

Tanggapan responden	**Item 9**		**Item 10**	
	F	**%**	**f**	**%**
Sangat setuju	2	6,67%	3	10,00%
Setuju	16	53,33%	15	50,00%
Ragu-ragu	12	40,00%	8	26,67%
Tidak setuju	0	0,00%	4	13,33%
Sangat tidak setuju	0	0,00%	0	0,00%
Total	**30**	**100%**	**30**	**100%**
% skor	**73,33%**		**71,33%**	

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.14 dapat dilihat paling banyak responden sependapat dengan pernyataan item 9, artinya paling banyak responden sependapat bahwa pemanfaatan asset secara optimal akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Demikian juga dengan pernyataan item 10, mayoritas responden sependapat bahwa pemanfaatan asset perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya akan dilakukan kategorisasi skor tanggapan responden tentang pemanfaatan aset pada masing-masing Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 4.15
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Pemanfaatan Aset Pada Masing-Masing Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	**Skor**	**Nomor Item Pernyataan**		**Total**
		9	**10**	
Kota Bandung	Aktual	19	19	**38**
	Ideal	25	25	**50**

Kabupaten/Kota	Skor	Nomor Item Pernyataan		Total
		9	10	
	%	76,0%	76,0%	**76,0%**
Kab. Kuningan	Aktual	13	13	**26**
	Ideal	20	20	**40**
	%	65,0%	65,0%	**65,0%**
Kota Banjar	Aktual	19	18	**37**
	Ideal	25	25	**50**
	%	76,0%	72,0%	**74,0%**
Kab. Sumedang	Aktual	14	13	**27**
	Ideal	20	20	**40**
	%	70,0%	65,0%	**67,5%**
Kab. Bogor	Aktual	15	15	**30**
	Ideal	20	20	**40**
	%	75,0%	75,0%	**75,0%**
Kab. Purwakarta	Aktual	16	16	**32**
	Ideal	20	20	**40**
	%	80,0%	80,0%	**80,0%**
Kab. Indramayu	Aktual	14	13	**27**
	Ideal	20	20	**40**
	%	70,0%	65,0%	**67,5%**
Akumulasi	**Aktual**	**110**	**107**	**217**
	Ideal	**150**	**150**	**300**
	%	**73,3%**	**71,3%**	**72,3%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Bila dilihat berdasarkan kabupaten kota, pemanfaatan asset pada Dinas Pendapatan kabupaten Purwakarta merupakan yang paling optimal, yaitu masuk kategori baik, sebaliknya pemanfaatan asset pada Dinas Pendapatan kabupaten Kuningan merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori cukup baik. Secara keseluruhan mekanisme pengambilan keputusan pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat termasuk optimal, hal ini tercermin dari persentase akumulasi total skor tanggapan responden sebesar 72,3% yang termasuk dalam kategori baik.

f) Mitra Kerja

Mitra kerja diukur menggunakan 2 butir pernyataan menyangkut pemeliharaan mitra kerja dalam meningkatkan profesionalisme.

Tabel 4.16
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Mitra Kerja

Tanggapan responden	**Item 11**		**Item 12**	
	F	**%**	**f**	**%**
Sangat setuju	6	20,00%	0	0,00%
Setuju	11	36,67%	24	80,00%
Ragu-ragu	11	36,67%	4	13,33%
Tidak setuju	2	6,67%	2	6,67%
Sangat tidak setuju	0	0,00%	0	0,00%
Total	**30**	**100%**	**30**	**100%**
% skor	**74,00%**		**74,67%**	

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.16 dapat dilihat paling banyak responden sependapat dengan pernyataan item 11, artinya paling banyak responden sependapat bahwa mitra kerja yang tidak profesionalisme umumnya lebih banyak merugikan perusahaan. Demikian juga dengan pernyataan item 12, mayoritas responden sependapat bahwa pemeliharaan mitra kerja yang ada saat ini pada perusahaan sudah bebas dari KKN.

Selanjutnya akan dilakukan kategorisasi skor tanggapan responden tentang mitra kerja pada masing-masing Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 4.17
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Mitra Kerja Pada Masing-Masing Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	**Skor**	**Nomor Item Pernyataan**		**Total**
		11	**12**	
Kota Bandung	Aktual	20	20	**40**
	Ideal	25	25	**50**

Kabupaten/Kota	Skor	Nomor Item Pernyataan		Total
		11	**12**	
	%	80,0%	80,0%	**80,0%**
Kab. Kuningan	Aktual	14	14	**28**
	Ideal	20	20	**40**
	%	70,0%	70,0%	**70,0%**
Kota Banjar	Aktual	17	17	**34**
	Ideal	25	25	**50**
	%	68,0%	68,0%	**68,0%**
Kab. Sumedang	Aktual	15	16	**31**
	Ideal	20	20	**40**
	%	75,0%	80,0%	**77,5%**
Kab. Bogor	Aktual	14	14	**28**
	Ideal	20	20	**40**
	%	70,0%	70,0%	**70,0%**
Kab. Purwakarta	Aktual	17	16	**33**
	Ideal	20	20	**40**
	%	85,0%	80,0%	**82,5%**
Kab. Indramayu	Aktual	14	15	**29**
	Ideal	20	20	**40**
	%	70,0%	75,0%	**72,5%**
Akumulasi	**Aktual**	**111**	**112**	**223**
	Ideal	**150**	**150**	**300**
	%	**74,0%**	**74,7%**	**74,3%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Bila dilihat berdasarkan kabupaten kota, mitra kerja pada Dinas Pendapatan kabupaten Purwakarta merupakan yang paling sehat, yaitu masuk kategori baik, sebaliknya mitra kerja pada Dinas Pendapatan kota Banjar merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori cukup baik. Secara keseluruhan mitra kerja pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat termasuk sehat, hal ini tercermin dari persentase akumulasi total skor tanggapan responden sebesar 74,3% yang termasuk dalam kategori baik.

g) Karyawan

Karyawan diukur menggunakan 2 butir pernyataan menyangkut penambahan jumlah karyawan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan.

Tabel 4.18
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Karyawan

Tanggapan responden	**Item 13**		**Item 14**	
	F	**%**	**f**	**%**
Sangat setuju	8	26,67%	1	3,33%
Setuju	10	33,33%	22	73,33%
Ragu-ragu	12	40,00%	5	16,67%
Tidak setuju	0	0,00%	2	6,67%
Sangat tidak setuju	0	0,00%	0	0,00%
Total	**30**	**100%**	**30**	**100%**
% skor	**77,33%**		**74,67%**	

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.18 dapat dilihat paling banyak responden sependapat dengan pernyataan item 13, artinya paling banyak responden sependapat bahwa jumlah karyawan dan kualifikasinya yang melebihi kebutuhan menyebabkan tingkat produktivitas menurun. Demikian juga dengan pernyataan item 14, mayoritas responden sependapat bahwa jumlah karyawan tiap tahunnya harus ditambah.

Selanjutnya akan dilakukan kategorisasi skor tanggapan responden tentang karyawan pada masing-masing Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 4.19
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Karyawan Pada Masing-Masing Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	**Skor**	**Nomor Item Pernyataan**		**Total**
		13	**14**	
Kota Bandung	Aktual	19	19	**38**
	Ideal	25	25	**50**

Kabupaten/Kota	Skor	Nomor Item Pernyataan		Total
		13	14	
	%	76,0%	76,0%	**76,0%**
Kab. Kuningan	Aktual	15	16	**31**
	Ideal	20	20	**40**
	%	75,0%	80,0%	**77,5%**
Kota Banjar	Aktual	17	15	**32**
	Ideal	25	25	**50**
	%	68,0%	60,0%	**64,0%**
Kab. Sumedang	Aktual	15	16	**31**
	Ideal	20	20	**40**
	%	75,0%	80,0%	**77,5%**
Kab. Bogor	Aktual	17	17	**34**
	Ideal	20	20	**40**
	%	85,0%	85,0%	**85,0%**
Kab. Purwakarta	Aktual	19	16	**35**
	Ideal	20	20	**40**
	%	95,0%	80,0%	**87,5%**
Kab. Indramayu	Aktual	14	13	**27**
	Ideal	20	20	**40**
	%	70,0%	65,0%	**67,5%**
Akumulasi	**Aktual**	**116**	**112**	**228**
	Ideal	**150**	**150**	**300**
	%	**77,3%**	**74,7%**	**76,0%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Bila dilihat berdasarkan kabupaten kota, karyawan pada Dinas Pendapatan kabupaten Purwakarta merupakan yang paling ideal, yaitu masuk kategori sangat baik, sebaliknya karyawan pada Dinas Pendapatan kota Banjar merupakan yang paling tidak ideal meskipun masih termasuk kategori cukup baik. Secara keseluruhan karyawan pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat termasuk ideal, hal ini tercermin dari persentase akumulasi total skor tanggapan responden sebesar 76,0% yang termasuk dalam kategori baik.

h) Efisiensi

Efisiensi diukur menggunakan 2 butir pernyataan menyangkut efisiensi Dispenda dan perusahaan daerah.

Tabel 4.20
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Efisiensi

Tanggapan responden	**Item 15**		**Item 16**	
	F	**%**	**f**	**%**
Sangat setuju	5	16,67%	3	10,00%
Setuju	14	46,67%	18	60,00%
Ragu-ragu	9	30,00%	9	30,00%
Tidak setuju	2	6,67%	0	0,00%
Sangat tidak setuju	0	0,00%	0	0,00%
Total	**30**	**100%**	**30**	**100%**
% skor	**74,67%**		**76,00%**	

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.20 dapat dilihat paling banyak responden sependapat dengan pernyataan item 15, artinya paling banyak responden sependapat bahwa tidak adanya standar biaya dalam kegiatan, menyebabkan efisiensi DISPENDA sangat rendah. Demikian juga dengan pernyataan item 16, mayoritas responden sependapat bahwa efisensi Perusahaan Daerah memiliki standar yang rendah.

Selanjutnya akan dilakukan kategorisasi skor tanggapan responden tentang efisiensi pada masing-masing Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 4.21
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Efisiensi Pada Masing-Masing Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	**Skor**	**Nomor Item Pernyataan**		**Total**
		15	**16**	
Kota Bandung	Aktual	18	20	**38**
	Ideal	25	25	**50**

Kabupaten/Kota	Skor	Nomor Item Pernyataan		Total
		15	**16**	
	%	72,0%	80,0%	**76,0%**
Kab. Kuningan	Aktual	15	16	**31**
	Ideal	20	20	**40**
	%	75,0%	80,0%	**77,5%**
Kota Banjar	Aktual	17	17	**34**
	Ideal	25	25	**50**
	%	68,0%	68,0%	**68,0%**
Kab. Sumedang	Aktual	13	14	**27**
	Ideal	20	20	**40**
	%	65,0%	70,0%	**67,5%**
Kab. Bogor	Aktual	17	16	**33**
	Ideal	20	20	**40**
	%	85,0%	80,0%	**82,5%**
Kab. Purwakarta	Aktual	18	17	**35**
	Ideal	20	20	**40**
	%	90,0%	85,0%	**87,5%**
Kab. Indramayu	Aktual	14	14	**28**
	Ideal	20	20	**40**
	%	70,0%	70,0%	**70,0%**
Akumulasi	**Aktual**	**112**	**114**	**226**
	Ideal	**150**	**150**	**300**
	%	**74,7%**	**76,0%**	**75,3%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Bila dilihat berdasarkan kabupaten kota, efisiensi pada Dinas Pendapatan kabupaten Purwakarta merupakan yang paling tinggi, yaitu masuk kategori sangat tinggi, sebaliknya efisiensi pada Dinas Pendapatan kabupaten Suemdang merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori cukup tinggi. Secara keseluruhan efisiensi pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat termasuk tinggi, hal ini tercermin dari persentase akumulasi total skor tanggapan responden sebesar 75,3% yang termasuk dalam kategori tinggi.

i) Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian

Mekanisme pengawasan dan pengendalian diukur menggunakan 2 butir pernyataan menyangkut pengawasan diperlukan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan Dispenda oleh DPRD.

Tabel 4.22
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian

Tanggapan responden	**Item 17**		**Item 18**	
	F	**%**	**f**	**%**
Sangat setuju	4	13,33%	3	10,00%
Setuju	13	43,33%	17	56,67%
Ragu-ragu	11	36,67%	10	33,33%
Tidak setuju	2	6,67%	0	0,00%
Sangat tidak setuju	0	0,00%	0	0,00%
Total	**30**	**100%**	**30**	**100%**
% skor	**72,67%**		**75,33%**	

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.24 dapat dilihat paling banyak responden sependapat dengan pernyataan item 17, artinya paling banyak responden sependapat bahwa pengawasan diperlukan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan DISPENDA untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Demikian juga dengan pernyataan item 18, mayoritas responden sependapat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas secara politis oleh DPRD.

Selanjutnya akan dilakukan kategorisasi skor tanggapan responden tentang mekanisme pengawasan dan pengendalian pada masing-masing Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 4.23
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Pada Masing-Masing Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	**Skor**	**Nomor Item Pernyataan**		**Total**
		17	**18**	
Kota Bandung	Aktual	19	19	**38**
	Ideal	25	25	**50**
	%	76,0%	76,0%	**76,0%**
Kab. Kuningan	Aktual	13	13	**26**
	Ideal	20	20	**40**
	%	65,0%	65,0%	**65,0%**
Kota Banjar	Aktual	16	20	**36**
	Ideal	25	25	**50**
	%	64,0%	80,0%	**72,0%**
Kab. Sumedang	Aktual	15	14	**29**
	Ideal	20	20	**40**
	%	75,0%	70,0%	**72,5%**
Kab. Bogor	Aktual	15	15	**30**
	Ideal	20	20	**40**
	%	75,0%	75,0%	**75,0%**
Kab. Purwakarta	Aktual	18	17	**35**
	Ideal	20	20	**40**
	%	90,0%	85,0%	**87,5%**
Kab. Indramayu	Aktual	13	15	**28**
	Ideal	20	20	**40**
	%	65,0%	75,0%	**70,0%**
Akumulasi	**Aktual**	**109**	**113**	**222**
	Ideal	**150**	**150**	**300**
	%	**72,7%**	**75,3%**	**74,0%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Bila dilihat berdasarkan kabupaten kota, mekanisme pengawasan dan pengendalian pada Dinas Pendapatan kabupaten Purwakarta merupakan yang paling baik, yaitu masuk kategori sangat baik, sebaliknya mekanisme pengawasan dan pengendalian pada Dinas Pendapatan kabupaten Kuningan merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori cukup baik. Secara keseluruhan

mekanisme pengawasan dan pengendalian pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat termasuk baik, hal ini tercermin dari persentase akumulasi total skor tanggapan responden sebesar 74,0% yang termasuk dalam kategori baik.

j) Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan diukur menggunakan 2 butir pernyataan menyangkut budaya yang lebih mementingkan rasa aman dan berorientasi profit.

Tabel 4.24
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Budaya Perusahaan

Tanggapan responden	**Item 19**		**Item 20**	
	F	**%**	**f**	**%**
Sangat setuju	2	6,67%	3	10,00%
Setuju	16	53,33%	15	50,00%
Ragu-ragu	12	40,00%	8	26,67%
Tidak setuju	0	0,00%	4	13,33%
Sangat tidak setuju	0	0,00%	0	0,00%
Total	**30**	**100%**	**30**	**100%**
% skor	**73,33%**		**71,33%**	

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.24 dapat dilihat paling banyak responden sependapat dengan pernyataan item 19, artinya paling banyak responden sependapat bahwa perusahaan daerah memiliki budaya yang lebih mementingkat rasa aman. Demikian juga dengan pernyataan item 20, mayoritas responden sependapat bahwa budaya perusahaan yang sudah terbentuk sebagai organisasi berorientasi profit.

Selanjutnya akan dilakukan kategorisasi skor tanggapan responden tentang budaya perusahaan pada masing-masing Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 4.25
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Budaya Perusahaan Pada Masing-Masing Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Skor	Nomor Item Pernyataan		Total
		19	20	
Kota Bandung	Aktual	19	19	**38**
	Ideal	25	25	**50**
	%	76,0%	76,0%	**76,0%**
Kab. Kuningan	Aktual	13	13	**26**
	Ideal	20	20	**40**
	%	65,0%	65,0%	**65,0%**
Kota Banjar	Aktual	19	18	**37**
	Ideal	25	25	**50**
	%	76,0%	72,0%	**74,0%**
Kab. Sumedang	Aktual	14	13	**27**
	Ideal	20	20	**40**
	%	70,0%	65,0%	**67,5%**
Kab. Bogor	Aktual	15	15	**30**
	Ideal	20	20	**40**
	%	75,0%	75,0%	**75,0%**
Kab. Purwakarta	Aktual	16	16	**32**
	Ideal	20	20	**40**
	%	80,0%	80,0%	**80,0%**
Kab. Indramayu	Aktual	14	13	**27**
	Ideal	20	20	**40**
	%	70,0%	65,0%	**67,5%**
Akumulasi	**Aktual**	**110**	**107**	**217**
	Ideal	**150**	**150**	**300**
	%	**73,3%**	**71,3%**	**72,3%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Bila dilihat berdasarkan kabupaten kota, budaya perusahaan pada Dinas Pendapatan kabupaten Purwakarta merupakan yang paling baik, yaitu masuk kategori baik, sebaliknya budaya perusahaan pada Dinas Pendapatan kabupaten Kuningan merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori cukup baik. Secara keseluruhan budaya perusahaan pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi

Jawa Barat termasuk baik, hal ini tercermin dari persentase akumulasi total skor tanggapan responden sebesar 72,3% yang termasuk dalam kategori baik.

Setelah diuraikan gambaran tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran faktor manajerial secara menyeluruh akan dilakukan kategorisasi terhadap akumulasi kesepuluh indikator. Berdasarkan jumlah skor kesepuluh indikator diperoleh persentase skor tanggapan responden pada masing-masing Dinas Pendapatan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

Tabel 4.26
Rekapitulasi Persentase Skor Tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Manajerial Pada Masing-Masing Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	**Skor**	**Faktor Manajerial**
Kota Bandung	Aktual Ideal	384 500
	%	76,8%
Kab. Kuningan	Aktual Ideal	284 400
	%	71,0%
Kota Banjar	Aktual Ideal	346 500
	%	69,2%
Kab. Sumedang	Aktual Ideal	290 400
	%	72,5%
Kab. Bogor	Aktual Ideal	310 400
	%	77,5%
Kab. Purwakarta	Aktual Ideal	340 400
	%	85,0%
Kab. Indramayu	Aktual	278

Kabupaten/Kota	Skor	Faktor Manajerial
	Ideal	400
	%	69,5%
Akumulasi	**Aktual** **Ideal**	**2232** **3000**
	%	**74,4%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Hasil kategorisasi menunjukkan bahwa faktor manajerial yang terdapat pada Dinas Pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sudah baik. Artinya intervensi birokrasi dan politis atau campur tangan pemerintah menyebabkan daerah otonom mampu mengembangkan potensi daerah yang didukung dengan kemandirian pihak manajemen dalam melaksanakan peraturan daerah. Disamping itu latar belakang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman pada pihak manajemen sudah sesuai dengan organisasi perusahaan sehingga mekanisme pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Dalam pemanfaatan aset, sudah diupayakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang disertai dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian oleh DPRD.

4.2.1.2 Penerimaan Pajak Reklame (X_2)

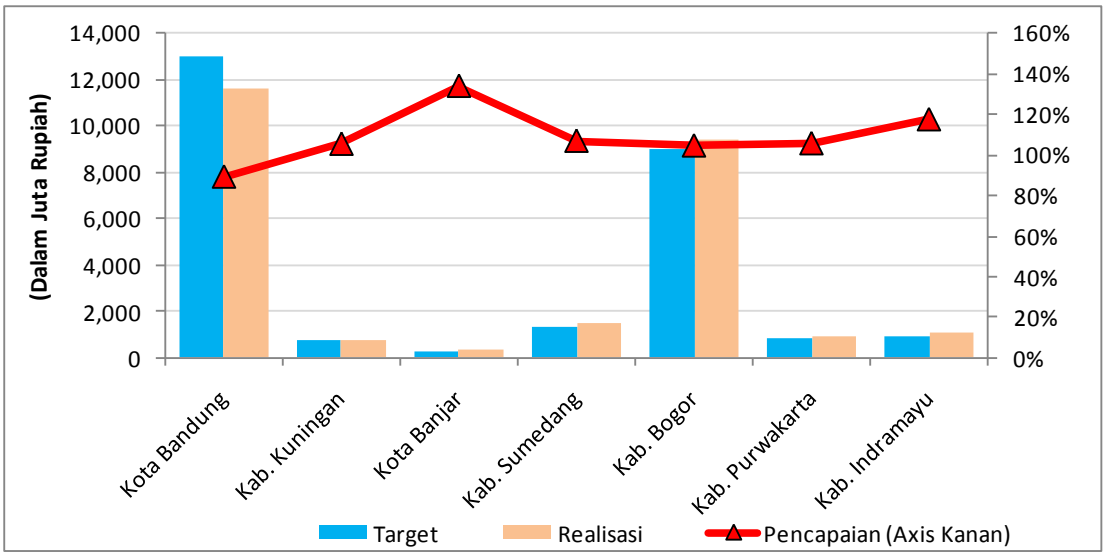
Penerimaan pajak reklame diukur dari perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan masing-masing dinas pendapatan kabupaten kota. Berdasarkan data realisasi penerimaan dan target diperoleh pencapaian penerimaan pajak reklame pada masing-masing kabupaten kota sebagai berikut.

Tabel 4.27
Data Penelitian Penerimaan Pajak Reklame (X_2)

Kabupaten/Kota	Target	Realisasi	Pencapaian
Kota Bandung	13,000,000,000.00	11,616,090,321.00	89,35%
Kab. Kuningan	734,281,000.00	774,718,545.00	105,51%
Kota Banjar	273,542,000.00	366,533,185.00	134,00%
Kab. Sumedang	1,380,000,000.00	1,476,346,675.00	106,98%
Kab. Bogor	9,000,000,000.00	9,419,384,033.00	104,66%
Kab. Purwakarta	865,300,600.00	915,080,355.00	105,75%
Kab. Indramayu	921,000,000.00	1,082,582,320.00	117,54%
Rata-rata			**112,41%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.29 dapat dilihat bahwa rata-rata penerimaan pajak reklame dari ketujuh kabupaten kota yang menjadi sampel penelitian sebesar 112,41%. Data ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame pada ketujuh kabupaten kota yang menjadi sampel penelitian secara rata-rata diatas target penerimaan. Hanya di kota Bandung realisasi penerimaan pajak reklame tidak mencapai target.



Gambar 4.1 Data Penelitian Penerimaan Pajak Reklame (X_2)

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di kota Banjar merupakan yang paling tinggi pada tahun 2010. Disusul kemudian Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di kabupaten Indramayu. Sebaliknya Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di kota Bandung merupakan yang terendah diantara ketujuh kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian.

4.2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (Y)

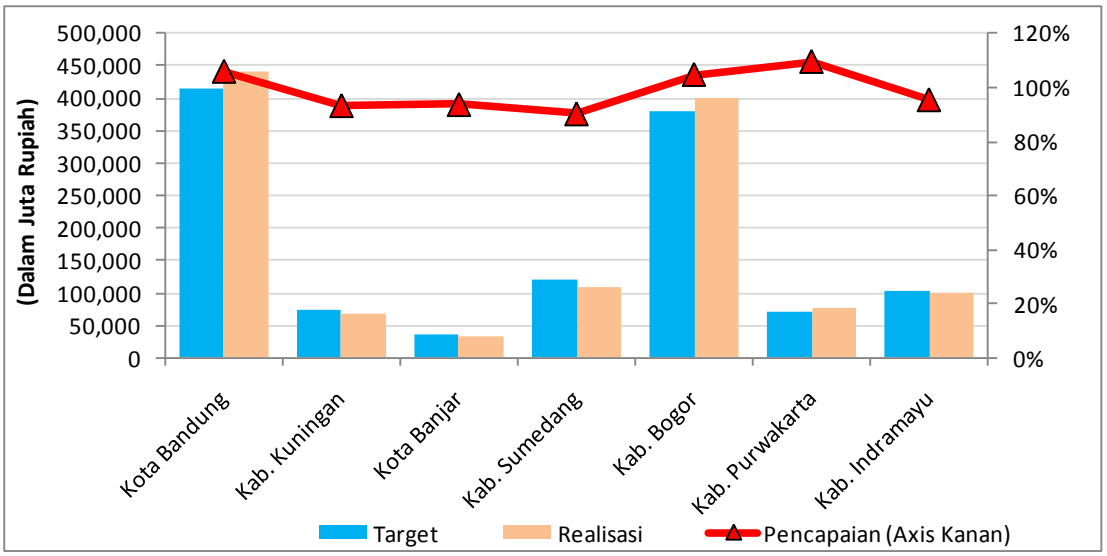
Pendapatan asli daerah diukur dari perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan masing-masing dinas pendapatan kabupaten kota. Berdasarkan data realisasi pendapatan asli daerah diperoleh pencapaian pendapatan asli daerah pada masing-masing kabupaten kota sebagai berikut:

Tabel 4.28
Data Penelitian Pendapatan Asli Daerah (Y)

Kabupaten/Kota	Target	Realisasi	Pencapaian
Kota Bandung	416,051,806,357.00	440,331,556,283.00	105,84%
Kab. Kuningan	72,935,375,414.00	68,159,263,173.00	93,45%
Kota Banjar	35,174,566,356.00	33,005,324,892.00	93,83%
Kab. Sumedang	120,039,975,404.25	108,610,927,276.25	90,48%
Kab. Bogor	381,351,329,000.00	399,282,285,844.00	104,70%
Kab. Purwakarta	70,095,482,738.00	76,691,372,256.00	109,41%
Kab. Indramayu	104,038,055,056.00	99,439,222,559.00	95,58%
Rata-rata			**97,91%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.30 dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi pendapatan asli daerah dari ketujuh kabupaten kota yang menjadi sampel penelitian sebesar 97,91%. Data ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah pada ketujuh kabupaten kota yang menjadi sampel penelitian secara rata-rata masih dibawah target penerimaan. Hanya di kota Bandung, kabupaten Bogor dan kabupaten Purwakarta realisasi pendapatan asli daerah mencapai target.



Gambar 4.2 Data Penelitian Pendapatan Asli Daerah (Y)

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi pendapatan asli daerah di kabupaten Purwakarta merupakan yang paling tinggi pada tahun 2010. Disusul kemudian Realisasi pendapatan asli daerah di kota Bandung. Sebaliknya Realisasi pendapatan asli daerah di kabupaten Sumendang merupakan yang terendah diantara ketujuh kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian.

4.2.2 Pengaruh Faktor Manajemen (X1) dan Penerimaan Pajak Reklame (X_2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Setelah diuraikan gambaran data variabel penelitian, selanjutnya untuk menguji pengaruh faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah maka dilakukan pengujian statistik baik secara simultan maupun parsial, namun sebelum data faktor manajerial diolah terlebih dahulu

dikonversi menjadi data interval menggunakan *method of succesive interval*. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; Pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi linier, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software SPSS.15. dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini.

4.2.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regressi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini hanya tiga asumsi yang disebutkan diatas tersebut diuji karena data yang dikumpulkan tidak mengandung unsur deret waktu maka tidak dilakukan uji autokorelasi.

1) Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regressi.

Tabel 4.29
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

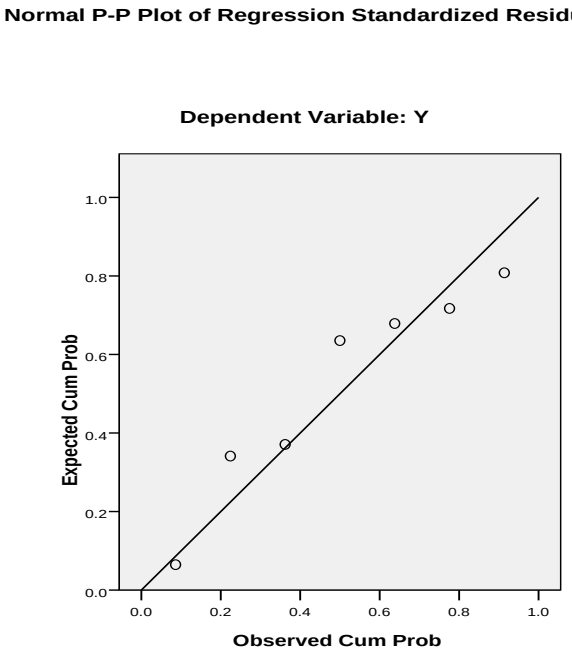
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.39058581
Most Extreme Differences	Absolute	.236
	Positive	.143
	Negative	-.236
Kolmogorov-Smirnov Z		.623
Asymp. Sig. (2-tailed)		.832

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4.29 dapat dilihat nilai probabilitas (sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,832. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal. Secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut



Gambar 4.3

Grafik Normal Probability Plot

Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal.

2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai variance

inflation factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.30
Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.714	1.400
	X2	.714	1.400

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.30 diatas menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas lebih besar dari 10 dan dapat disimpulkan terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error). Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.31 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error).

Tabel 4.31
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			absolut_error
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	-.071
		Sig. (2-tailed)	.879
		N	7
	X2	Correlation Coefficient	-.214
		Sig. (2-tailed)	.645
		N	7

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.31 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), dimana nilai signifikansi (sig) dari masing-masing koefisien korelasi kedua variabel bebas dengan nilai absolut error (0,879 dan 0,645) masih lebih besar dari 0,05.

Setelah ketiga asumsi regressi diuji, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, yaitu pengaruh faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

4.2.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Estimasi model regresi linier berganda ini menggunakan software SPSS.15 dan diperoleh hasil output sebagai berikut :

Tabel 4.32

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	55.937	26.906		2.079	.106
	X1	.911	.288	.857	3.165	.034
	X2	-.032	.146	-.058	-.216	.840

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

$Y = 55{,}937 + 0{,}911\ X_1 - 0{,}032\ X_2$

Dimana :

Y = Pendapatan asli daerah

X_1 = Faktor manajerial

X_2 = Penerimaan pajak reklame

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 55,937 persen menunjukkan bahwa jika faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame sama dengan nol maka rata-rata realisasi pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat akan mengalami penurunan sebesar 55,937 persen.
2. Faktor manajerial memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,911, artinya setiap peningkatan faktor manajerial sebesar 1 tingkat diprediksi akan meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 0,911 persen dengan asumsi penerimaan pajak reklame tidak berubah.

3. Penerimaan pajak reklame memiliki koefisien bertanda negatif sebesar 0,032 persen, artinya setiap peningkatan realisasi penerimaan pajak reklame sebesar 1 persen diprediksi akan menurunkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 0,032 persen dengan asumsi faktor manajerial tidak berubah.

4.2.2.3 Analisis Korelasi Parsial

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen (faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame) dengan pendapatan asli daerah. Melalui korelasi parsial akan dicari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap pendapatan asli daerah ketika variabel independen lainnya dianggap konstan.

a. Korelasi Faktor Manajerial Dengan Pendapatan Asli Daerah Ketika Penerimaan Pajak ReklameTidak Berubah

Koefisien korelasi antara faktor manajerial dengan pendapatan asli daerah ketika penerimaan pajak reklame tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.33

Koefisien Korelasi Parsial Faktor Manajerial Dengan Pendapatan Asli Daerah

Correlations

Control Variables			X1	Y
X2	X1	Correlation	1.000	.845
		Significance (2-tailed)	.	.034
		df	0	4
	Y	Correlation	.845	1.000
		Significance (2-tailed)	.034	.
		df	4	0

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Hubungan antara faktor manajerial dengan pendapatan asli daerah ketika penerimaan pajak reklame tidak berubah adalah sebesar 0,845 dengan arah positif. Artinya hubungan faktor manajerial dengan pendapatan asli daerah sangat kuat ketika penerimaan pajak reklame tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika faktor manajerial meningkat, sementara penerimaan pajak reklame tidak berubah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian besar pengaruh faktor manajerial terhadap pendapatan asli daerah ketika penerimaan pajak reklame tetap adalah $(0{,}845)^2 \times 100\% = 71{,}4\%$.

b. Korelasi Penerimaan Pajak Reklame Dengan Pendapatan Asli Daerah Ketika Faktor Manajerial Tidak Berubah

Koefisien korelasi antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah ketika faktor manajerial tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.34
Koefisien Korelasi Parsial Penerimaan Pajak Reklame Dengan Pendapatan Asli Daerah

Correlations

Control Variables			X2	Y
X1	X2	Correlation	1.000	-.107
		Significance (2-tailed)	.	.840
		df	0	4
	Y	Correlation	-.107	1.000
		Significance (2-tailed)	.840	.
		df	4	0

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2011

Hubungan antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah ketika faktor manajerial tidak berubah adalah sebesar 0,107 dengan arah negatif. Artinya hubungan penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah sangat lemah ketika faktor manajerial tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika penerimaan pajak reklame meningkat, sementara faktor manajerial tidak berubah maka akan menurunkan pendapatan asli daerah. Kemudian besar pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah ketika faktor manajerial tetap adalah $(-0,107)^2 \times 100\% = 1,1\%$.

4.2.2.4 Koefisien Korelasi Berganda

Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukan kekuatan hubungan antar kedua variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel pendapatan asli daerah. Hubungan korelasi secara simultan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.35
Analisis Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.889[a]	.791	.686	4.15260

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan data pada tabel 4.35 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi ganda adalah sebesar 0,889 yang berada antara 0,80 - 1,00, artinya faktor

manajerial dan penerimaan pajak reklame secara simultan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pendapatan asli daerah.

4.2.2.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Untuk nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.34 tepatnya dilihat dari nilai R Square yaitu sebesar 0,791 atau 79,1%, artinya pengaruh faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame secara simultan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 79,1% sedangkan sisanya yaitu 20,9% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Seperti: penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.

4.2.2.6 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh faktor manajerial, dan penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat silihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS.15. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

   $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$: Menunjukkan variabel faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel

pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$: Menunjukan variabel faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame berpengaruh secara simultan terhadap variabel pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan (k; n-k-1) df= 2;4. Pada tabel F untuk df_1= 2, df_2=4, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 6,944.

c. Mencari nilai F_{hitung}

Dengan bantuan software SPSS v.15, diperoleh output untuk mendapatkan nilai dari F_{hitung} sebagai berikut :

Tabel 4.36
Anova Untuk Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	260.473	2	130.237	7.553	.044[a]
	Residual	68.976	4	17.244		
	Total	329.450	6			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Pada tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 7,553.

d. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan :

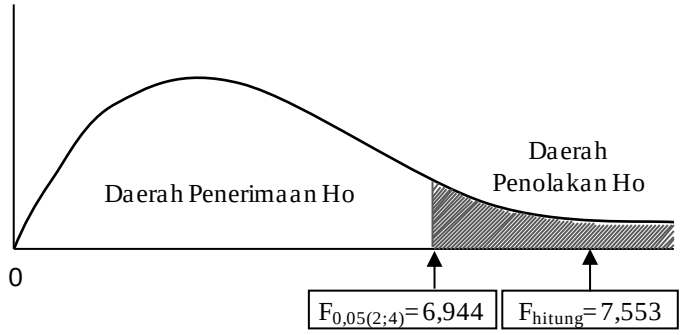
Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $F_{hitung} < F_{tabel,}$ maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ (7,553 > 6,944), maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti kedua variabel bebas, yaitu faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu peneliti juga melakukan pengujian dengan cara melihat tingkat signifikansi yang dapat dilihat pada tabel 4.38

Dari tabel ANOVA diatas diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,044, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah Ho ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.4
Daerah Penolakan H_0 Pada Pengujian Secara Bersama-sama

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena F_{hitung} sebesar 7,553 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.2.2.7 Pengaruh Faktor manajerial dan Penerimaan pajak reklame Terhadap Pendapatan asli daerah Secara Parsial.

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,776 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 4 untuk pengujian dua pihak. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.37
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	55.937	26.906		2.079	.106
	X1	.911	.288	.857	3.165	.034
	X2	-.032	.146	-.058	-.216	.840

a. Dependent Variable: Y

Nilai statistik uji t yang terdapat pada tabel 4.37 selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} untuk menentukan apakah variabel yang sedang diuji berpengaruh signifikan atau tidak.

1) Pengaruh Faktor manajerial Secara Parsial Terhadap Pendapatan asli daerah.

Untuk menguji pengaruh faktor manajerial terhadap pendapatan asli daerah maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

   $H_0 : \beta_1 = 0$: Menunjukan bahwa faktor manajerial secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

   $H_a : \beta_1 \neq 0$: Menunjukan bahwa faktor manajerial secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Dinas Pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 7-2-1= 4, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,776.

c. Mencari nilai t_{hitung}

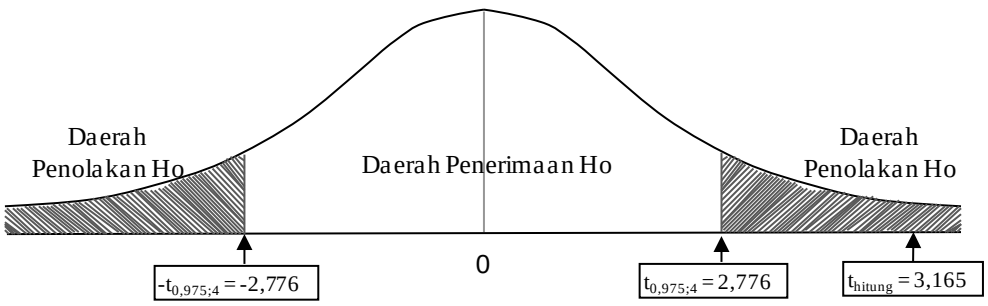
Dengan bantuan software SPSS.15, seperti terlihat pada tabel 4.36 diperoleh nilai t_{hitung} variabel faktor manajerial sebesar 3,165

d. Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,165 > 2,776), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti faktor manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut:



Gambar 4.5
Hasil Uji t Faktor manajerial Terhadap Pendapatan asli daerah

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa Ho diterima, karena t_{hitung} sebesar 3,165 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa faktor manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Karena faktor manajerial mempunyai peran yang sangat penting bagi dispenda karena kinerja yang baik akan dapat meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah.

2) Pengaruh Penerimaan pajak reklame Secara Parsial Terhadap Pendapatan asli daerah.

Untuk menguji pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

Hipotesis kedua

$H_0 : \beta_2 = 0$: Menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

$H_a : \beta_2 \neq 0$: Menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame secara parsial berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 7-2-1= 4, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,776.

c. Mencari nilai t_{hitung}

Dengan bantuan software SPSS.15, seperti terlihat pada tabel 4.36 diperoleh nilai t_{hitung} variabel penerimaan pajak reklame sebesar -0,216.

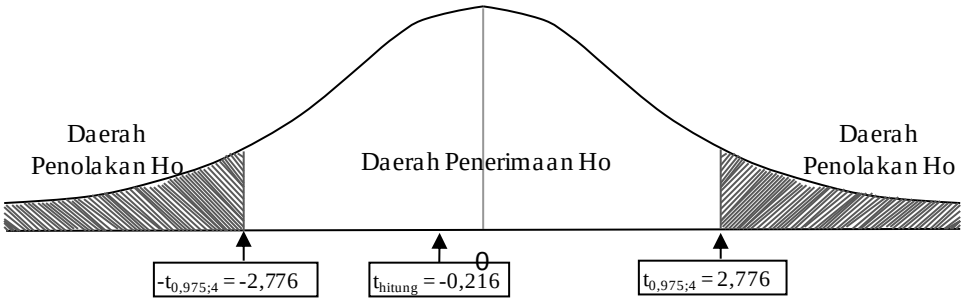
d. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel, s}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-0,216 < 2,776), sehingga Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti variabel penerimaan pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.6
Hasil Uji t Penerimaan pajak reklame Terhadap Pendapatan asli daerah

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar -0,216 berada pada daerah penerimaan Ho, yang berarti bahwa penerimaan pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Karena penerimaan pajak reklame lebih sedikit dibandingkan dengan penerimaan-penerimaan lainnya seperti: penerimaan pajak hotel, pajak pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.